

**PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN AKUISISI ARSIP
TERHADAP KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN KEARSIPAN DI
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN GARUT**

EET SAEFUL HIDAYAT

Dosen Program Studi Administrasi Publik
FISIP-Universitas Galuh

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip terhadap koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mewujudkan kualitas pelayanan arsip di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Garut, berangkat dari berbagai fenomena yang terjadi di unit pemerintahan organisasi pemerintah terutama masalah pelayanan publik, salah satunya adalah pelayanan kearsipaan secara kumulatif tidak memuaskan, diukur dengan persentase pelayanan kepada pengguna jasa dengan rasio (8:24) atau baru mencapai 33,3%, dimana sejumlah data seperti SPJ, SPM dan DPA, kabupaten perbatasan Peta kronologis, dokumen budaya seni Garut, angka riwayat hidup, register akta kelahiran masih belum bisa dilayani karena tidak tersedianya data, ini menunjukkan kinerja arsip tidak optimal dalam hal standar pelayanan. Secara khusus peneliti mengidentifikasi dan merumuskan 3 (tiga) variabel, yaitu pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip, koordinasi antara SKPD dan kualitas pelayanan ditandai dengan gejala tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan akuisisi tersebut dalam hal upaya penyelamatan arsip di Garut. Koordinasi antara Satuan kerja perangkat daerah dan badan perpustakaan dan kearsipan daerah belum baik dan manajemen kearsipan masih kurang di mana tidak ada penerapan sistem pengolahan teknologi khusus dari arsip terpadu secara on- line, serta daya dukung infrastruktur yang masih kurang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan tehnik survey. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 93 orang pengelola arsip yang tersebar di SKPD di Kabupaten Garut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi lapangan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (path analysis). Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan kearsipan di badan perpustakaan dan kearsipan daerah Kabupaten Garut dan Koordinasi SKDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan kearsipan di badan perpustakaan dan kearsipan daerah kabupaten Garut.

Kata Kunci: Kebijakan Akuisi, Koordinasi SKPD, Pelayanan Kearsipan.

I. PENDAHULUAN

Badan perpustakaan dan kearsipan daerah dianggap memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga rekam jejak kebijakan pemerintah karena menjadi benteng terakhir yang menjadi bahan bukti resmi *akuntabilitas* pemerintahan, pembangunan dan kehidupan berbangsa, maka kompetensi sumber daya manusia, daya dukung infrastruktur, pelayan publik harus bisa bersinergi dengan manajemen kearsipan sesuai Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal (6) bahwa manajemen kearsipan bertujuan untuk menjamin keselamatan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyelamatkan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi kegiatan pemerintahan sebaik-baiknya sehingga publik mendapat pelayanan secara prima.

Pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip diduga belum dilakukan secara optimal sehingga menyebabkan lemahnya koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan berimbas pada kualitas pelayanan kearsipannya, padahal kebijakan akuisisi arsip merupakan regulasi yang dapat mengatur keseimbangan tujuan pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat dengan tujuan pemberdayaan organisasi secara internal melalui pelayanan kearsipan dengan harapan agar tujuan akuisisi kearsipan sebagaimana dinyatakan

dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 pasal (1) ayat (22) dapat diwujudkan yakni: akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan, sehingga dapat mempengaruhi koordinasi SKPD dan pencapaian terbangunnya kualitas pelayanan kearsipan yang optimal.

Pada pengamatan awal, penulis menemukan beberapa faktor penyebab menurunnya satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan akuisisi. *Pertama* kurangnya sosialisasi tentang kearsipan. *kedua* kurangnya sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya. *ketiga* kurangnya pemahaman tentang pentingnya arsip dan standar operasional pelaksanaan akuisisi arsip. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan data perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kabupaten Garut, yaitu bidang Pemuda dan Olahraga berubah menjadi Dinas Pemuda dan Olah raga serta bidang komunikasi Dishub dan bagian Informatika Setda berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO). Sebelum terjadi perubahan struktur organisasi seharusnya setiap SKPD yang berubah statusnya harus diakuisisi terlebih dahulu untuk penyelamatan arsip, tetapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan. Hal ini diduga kurangnya koordinasi antara SKPD dengan pihak BAPUSIPDA untuk melaksanakan

akuisisi arsip. Pelaksanaan akuisisi seharusnya dilakukan secara berkala, setiap perubahan struktur organisasi dan setiap penggantian kepala daerah.

Disinilah peran penting penerapan prinsip koordinasi, karena menyatupadukan setiap gerak aktifitas seluruh potensi dan unit-unit organisasi berfungsi atau organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efisien. Kualitas pelayanan yang diwujudkan dalam efektifitas dan efisiensi merupakan salah satu indikator berjalannya tatakelola organisasi yang baik, kualitas pelayanan merupakan hasil dari proses kerja yang sesuai dengan SOP organisasi, sebagaimana disampaikan oleh Iskandar (2014: 344) bahwa kualitas pelayanan (*service quality*) telah hampir menjadi faktor yang menentukan dalam menjaga keberlangsungan suatu organisasi birokrasi pemerintah maupun organisasi swasta. Pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa publik sangat penting dalam upaya mewujudkan kepuasan pengguna jasa public (*costumer satisfactioan*).

Pengelola kearsipan di setiap SKPD secara berkala telah melalui proses pembinaan dan pelatihan, potensi ini seharusnya memperkuat pengelolaan kearsipan, namun realitasnya SKPD masih kurang tanggap terhadap persoalan yang terjadi dalam masalah kearsipan, tingginya

kunjungan peminjam arsip ke BAPUSIDA merefleksikan lemahnya bagian kearsipan SKPD dalam melayani kebutuhan pengguna jasa, sehingga pengguna jasa seringkali tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh dalam proses peminjaman sebuah arsip, hal ini mendorong terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas pelayanan oleh BAPUSIDPA kabupaten Garut.

Fenomena tersebut menurut hemat peneliti terjadi karena SKPD sebagai lembaga teknis daerah yang berposisi sebagai mitra kerja terhadap perubahan kebijakan akuisisi BAPUSIPDA belum dipahami secara merata yang kemudian dari kondisi tersebut diatas mengakibatkan kualitas pelayanan sebagai output dari produk yang dihasilkan sebuah proses manajemen kearsipan belum maksimal, hal ini terlihat dari masih belum jelasnya konsep kebijakan strategis dan kurang optimalnya kualitas pelayanan kearsipan.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, belum terlaksananya kebijakan akuisisi arsip, koordinasi antara SKPD dan terwujudnya pelayanan yang berkualitas ditunjukkan dengan gejala antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan akuisisi dalam upaya penyelamatan arsip di kabupaten Garut. Hal ini disebabkan oleh rendahnya atensi dan apresiasi terhadap kearsipan yang berimplikasi lemahnya

perlindungan dan pengamanan terhadap arsip terkait dengan keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang berpotensi menyebabkan melemahnya kinerja kearsipan.

2. Koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah dan badan perpustakaan dan kearsipan daerah belum terjalin dengan baik. Hal ini menyebabkan perbedaan persepsi dan tidak mendorong pada sinergitas pengelola kearsipan di tiap SKPD untuk mendistribusikan arsip ke Bapusipda.
3. Kurang efektifnya pengelolaan kearsipan, dilihat dari pelayanan arsip yang masih manual dimana tidak ada penerapan teknologi informasi dan komunikasi seperti peralatan komputer yang khusus mengolah sistem kearsipan yang terintegrasi secara *on line*, serta daya dukung infrastruktur bagian pelayanan yang masih kurang *representatif*.

Berdasarkan studi pendahuluan di atas, kualitas pelayanan jelas merupakan aspek mendasar yang sangat berpengaruh terhadap partisipasi publik. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus oleh seluruh *stakeholder* maupun segenap unsur kearsipan terhadap pencapaian kualitas pelayanan, agar pelayanan yang ada dapat mendorong terciptanya tatakelola lembaga secara maksimal.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang,

yang menjadi pernyataan masalah (*Problem Statement*) dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dengan rumusan sebagai berikut : berdasarkan pengamatan sementara diperoleh gambaran bahwa kualitas pelayanan kearsipan belum mencapai hasil yang optimal. Banyak faktor penyebabnya diduga antara lain peran koordinasi antar SKPD yang belum efektif serta pelaksanaan kebijakan akuisisi kearsipan belum secara merata dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

Sehubungan pernyataan masalah tersebut diatas, maka jurnal ini membahas pengaruh pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip terhadap koordinasi satuan kerja perangkat daerah dalam mewujudkan kualitas pelayanan kearsipan di badan perpustakaan dan kearsipan daerah kabupaten Garut ?”

II. TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi negara merupakan salah satu aspek dari kegiatan pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2012:17) Administrasi negara adalah “keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”. Pendapat tersebut sejalan dengan Waldo (dalam Iskandar 2015: 17) yang mendefinisikan administrasi negara sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Perkembangan lebih lanjut dari suatu administrasi negara sangat berkaitan erat dengan struktur birokrasi pemerintah (*the governments bureaucracy structure*) yaitu sebagai pengaturan organisasi dan konsep-konsep dalam ilmu politik. Siagian (dalam Iskandar, 2015:18) memberikan pengertian administrasi negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Oleh sebab itu, ilmu administrasi negara tidak saja mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah tetapi juga bagaimana melakukannya.

Variabel ini akan diukur berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward (dalam Winarno, 2012:177) ada 4 (empat) faktor yang berpengaruh menguraikan bagaimana keputusan - keputusan kebijakan dilaksanakan, yang selanjutnya oleh penulis digunakan sebagai dimensi implementasi kebijakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut : Komunikasi (*communication*), Sumber daya (*Resources*), Sikap pelaksana (Disposisi), Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Penulis mengangkat koordinasi dari pandangan Iskandar (2014: 217) yang secara spesifik lebih menyoroti tentang hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan adalah kurangnya koordinasi.

“ Koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau

bidang fungsional) dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya secara efisien, fungsi koordinasi ini demikian penting apalagi bila organisasi harus berjalan sebagai suatu sistem, sebagai suatu kesatuan bulat dari bagian (sub sistem) yang saling berhubungan, saling menunjang dan saling bergantung. Konsepsi variabel-variabel tersebut akan diuraikan melalui dimensi-dimensi yaitu meliputi : Unit atau organisasi, Sumber-sumber atau potensi, Kesatupaduan, Gerak kegiatan, Keserasian, Arah yang sama

Pelayanan merupakan salah satu fungsi manajemen pemerintah dalam melayani beragam kepentingan publik, karena semakin baik pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, semakin tinggi apresiasi publik terhadap pemerintah yang akan menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga pada akhirnya akan mendorong pada partisipasi publik dalam pembangunan. Kondisi tersebut menurut Gore (dalam Iskandar 2015:331) menjelaskan bahwa pemerintahan yang digerakan oleh suatu kesadaran baru dan sikap *responsive* dari para pengguna jasa (*government is driven by a new awareness of anf responsiveness to costumer*). Hal ini menggambarkan begitu pentingnya aspek pelayanan dalam manajemen public yang baik. Lebih lanjut Iskandar (2015: 342) menjelaskan pula bahwa kualitas

pelayanan (*service quality*) telah hampir menjadi faktor yang menentukan dalam menjaga keberlangsungan suatu organisasi birokrasi pemerintahan maupun organisasi perusahaan. Pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa public sangat penting dalam upaya mewujudkan kepuasan pengguna jasa public (*customer satisfaction*)

Parasuraman, Zeithaml dan Barry (dalam Tjiptono, 2011:196-197) telah menyederhanakan dimensi kualitas pelayanan dan mengembangkan suatu alat ukur kualitas layanan yang disebut SERVQUAL (*Service Quality*) dimana ada 5 (lima) faktor yang berpengaruh bagaimana skala multi item yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan dapat digunakan untuk mengukur persepsi pelanggan atas kualitas layanan, yang selanjutnya oleh penulis digunakan sebagai dimensi kualitas pelayanan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut yaitu: *Responsiveness* (Cepat Tanggap) *Reliability*, *Assurance*, *Empathy*, *Tangible*

Berdasarkan pada kerangka peikiran yang diuraikan diatas, maka hipotesisi yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis utama :

H₀ Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip terhadap koordinasi SKPD dalam mewujudkan kualitas pelayanan arsip di BAPUSIPDA Kabupaten Garut

H₁ Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip terhadap koordinasi SKPD dalam mewujudkan kualitas pelayanan arsip di BAPUSIPDA Kabupaten Garut

Hipotesis utama diatas diuraikan kedalam sub-sub hipotesis, yaitu: Sub Hipotesis 1:

H₀ Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip terhadap koordinasi SKPD di BAPUSIPDA Kabupaten Garut

H₁ Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip terhadap koordinasi SKPD di BAPUSIPDA Kabupaten Garut

Sub Hipotesis 2:

H₀ Tidak terdapat pengaruh koordinasi SKPD terhadap kualitas pelayanan arsip di BAPUSIPDA Kabupaten Garut

H₁ Terdapat pengaruh koordinasi SKPD terhadap kualitas pelayanan arsip di BAPUSIPDA Kabupaten Garut

Sub Hipotesis 3:

H₀ Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip terhadap kualitas pelayanan arsip Di BAPUSIPDA Kabupaten Garut

H₁ Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip terhadap kualitas pelayanan arsip di BAPUSIPDA Kabupaten Garut

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan deskripsi dengan teknik survey, maka dari causal effectual tersebut metode yang dipergunakan adalah teknis analisis jalur (path analisis). Dimana variable Variabel penelitian terdiri atas 3 (tiga) variabel pokok, meliputi variabel bebas diberi notasi X, yaitu pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip dan variabel antara yaitu koordinasi SKPD diberi notasi Y serta variabel terikat yaitu kualitas pelayanan kearsipan yang diberi notasi Z. Dengan jumlah mekai teknis sampling jenuh terhadap maka dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik penarikan sampel dengan teknik sampling jenuh (sensus) dimana peneliti langsung menetapkan seluruh populasi sebanyak 93 orang dijadikan responden penelitian atau responden, dalam hal ini objek yang dijadikan populasi adalah seluruh pengelola kearsipan di Kabupaten Garut indikator sebanyak dan 66 butir item pertanyaan.

Peneliti terlebih dahulu akan mengemukakan definisi operasionalisasi variabel penelitian, agar pengertian variabel penelitian yang diteliti sesuai dengan konteks penelitian untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi terhadap pengertian masing-masing variabel, sebagai berikut :

1. Variabel Pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip (X) adalah

pelaksanaan kebijakan dan tindak lanjut dari koordinasi SKPD sebagai lembaga teknis daerah untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang diukur melalui skor total jawaban responden dari butir item pertanyaan yang meliputi dimensi : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

2. Variable koordinasi SKPD (Y) adalah proses penyatupaduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya secara efisien, yang diukur melalui skor total jawaban responden dari butir item pertanyaan yang meliputi dimensi organisasi, sumber atau potensi, kesatupaduan, gerak kegiatan, keserasian dan arah yang sama
3. Variabel Kualitas Pelayanan (Z) adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan, yang diukur melalui skor total jawaban responden dari butir item pertanyaan yang meliputi dimensi *responsiveness, reliability, assurance, empathy, tangible,*

IV. HASIL PENELITIAN

Hasil Pengujian Hipotesis Utama

Hasil Pengujian Hipotesis Utama diketahui bahwa variabel pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Kualitas Pelayanan Kearsipan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Kabupaten Garut. Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu $F_{hitung} = 9,0588 > F_{tabel} = 8,90$. Sehingga diperoleh keputusan H_0 ditolak. Dari Koefisien Determinasi (R^2_{YXX}) sebesar **0,2337** atau **23,37** %. sedangkan sisanya sebesar **76,63**% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Kondisi tersebut secara empirik menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip yang dilaksanakan secara optimal dapat memberikan dampak positif terhadap koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Hipotesis 1

Hasil pengujian sub hipotesis Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel pengaruh pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip terhadap koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan

t_{tabel} . Berdasarkan hasil pengujian diperoleh $t_{hitung} = 2.5568 > t_{tabel} = 1,9870$. Dengan demikian, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka **H_0 ditolak**, artinya Pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip berpengaruh secara signifikan terhadap koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh koefisien determinasi R^2_{YX} sebesar 0.0670. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip sebesar **6,70**% sedangkan sisanya sebesar 93,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel koordinasi SKPD

Kondisi tersebut secara empirik menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip memberikan pengaruh nyata terhadap koordinasi SKPD, hal ini dikarenakan keduanya merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam meningkatkan kinerja organisasi yang terefleksikan dalam wujud kualitas pelayanan kearsipan. Selain itu dapat meningkatkan wawasan pengelola arsip di BAPUSIPDA dan SKPD – SKPD sehingga tata kelola kearsipan yang ada di SKPD serta mensinergikan dengan berbagai layanan kearsipan dan pepustakaan

Hipotesis 2

Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $t_{hitung} = 3,4447 > t_{tabel} = 1,9870$.

Dengan demikian, karena $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka **H_0 ditolak**, artinya variabel pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip berpengaruh secara nyata terhadap kualitas pelayanan kearsipan di badan perpustakaan dan kearsipan daerah (BAPUSIPDA) Kabupaten Garut. Besar pengaruh secara langsung implementasi kebijakan akuisisi arsip memberikan pengaruh nyata dan positif terhadap kualitas pelayanan kearsipan adalah sebesar **10,94 %**, sedangkan implementasi kebijakan akuisisi arsip memberikan pengaruh nyata dan positif kualitas pelayanan kearsipan melalui koordinasi SKPD adalah sebesar **2,38 %**. Sehingga jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Implementasi Kebijakan akuisisi arsip memberikan pengaruh nyata dan positif terhadap kualitas pelayanan Arsip di SKPD sebesar **13,32 %** sedangkan sisanya sebesar **73,36%** dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel variabel kebijakan yang tidak dimasukan kedalam model

Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh *koefisien determinasi* R^2_{ZX} sebesar 0.8678. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel Pelaksanaan Kebijakan Akuisisi Arsip dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kearsipan sebesar 86.78% sedangkan sisanya sebesar 13.22 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip dan kualitas pelayanan kearsipan.

Hipotesis 3

Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $t_{hitung} = 2.8916 > t_{tabel} = 1.9870$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka **H_0 ditolak**, artinya koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah berpengaruh secara nyata terhadap kualitas pelayanan kearsipan. Besarnya pengaruh koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap kualitas pelayanan kearsipan secara langsung adalah sebesar sebesar r_{zy}^2 sebesar **0,1008** atau sebesar **10, 08 %**, sedangkan sisanya **89,92 %** yang tidak dimasukan kedalam model

Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh *koefisien determinasi* R^2_{ZY} sebesar 0.0840 Nilai ini menunjukkan bahwa variabel koordinasi satuan kerja perangkat daerah dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kearsipan 0.0282 sebesar 2.82 % sedangkan sisanya sebesar 97.18% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan kualitas pelayanan kearsipan. Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi satuan kerja perangkat daerah memiliki pengaruh positif terhadap terhadap kualitas pelayanan kearsipan hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi terhadap peningkatan pelayanan, diantaranya, Motivasi, Pembinaan , SOP serta *job description*.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip terhadap koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam mewujudkan kualitas pelayanan kearsipan di Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Kabupaten Garut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip berpengaruh positif dan signifikan terhadap koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam mewujudkan kualitas pelayanan kearsipan di badan perpustakaan dan kearsipan daerah kabupaten Garut
2. Variabel pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip berpengaruh positif dan signifikan terhadap koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Garut
3. Variabel pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan kearsipan di badan perpustakaan dan kearsipan daerah kabupaten Garut
4. Variabel koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan kearsipan di badan perpustakaan dan kearsipan daerah kabupaten Garut

Selanjutnya, temuan-temuan permasalahan penting lainnya yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

Pertama, pada variabel Pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip, ditemukan sejumlah permasalahan seperti:

1. Para pemegang otoritas di tiap SKPD belum secara merata memahami tata kelola kearsipan.(kesamaan persepsi di kalangan birokrat)
2. Sumber daya manusia yang secara kualifikasi belum memenuhi standar yang dibutuhkan
3. Pemerintah Daerah belum secara kontinyu mengalokasikan *budget* / anggaran untuk pembenahan secara menyeluruh terutama peningkatan kualifikasi pengelola arsip (SDM) dan pembenahan infrastruktur di masing-masing SKPD bagian kearsipan.

Kedua, pada variabel koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ditemukan permasalahan, yaitu :

1. Ada ketidakseragaman dalam mengelola arsip yang diakibatkan oleh lemahnya kompetensi profesional pengelola arsip.
2. Belum meratanya pemahaman seluruh SKPD dalam memahami kebijaksanaan kearsipan.

Ketiga, pada variabel kualitas pelayanan kearsipan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) kabupaten Garut ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Persentase *skill* dan pengetahuan pengelola arsip yang belum memenuhi kualifikasi sehingga

mempengaruhi terhadap pelayanan yang rendah.

2. Pelaksanaan pembinaan pengelola arsip masih rendah.

Sehubungan dengan itu maka implikasi hasil penelitian dan temuan permasalahan penting lainnya terhadap objek atau fenomena penelitian, yaitu walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya variabel yang mengindikasikan hasil yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan pada item jawaban responden sebagaimana temuan-temuan masalah tersebut di atas yang pada gilirannya berikutnya akan mempengaruhi terhadap kualitas pelayanan kearsipan.

VI. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan temuan-temuan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

Pertama, karena adanya latar belakang permasalahan pada variabel pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip yang belum optimal, terkait dengan pengelolaan kearsipan ditempat anda bekerja didukung oleh kelancaran penyaluran dana atau insentif, maka disarankan agar kepala BAPUSIPDA kabupaten Garut hendaknya mengajukan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembenahan kearsipan secara menyeluruh. Secara operasional langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah

1. Pada dimensi sosialisasi, secara berkala terus melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan akuisisi arsip melalui berbagai media promotif dan aktivitas resmi.

2. Pada dimensi sumber daya seyogyanya dilakukan pelatihan dan pendidikan tenaga pengelola kearsipan secara kontinyu baik diselenggarakan secara formal ataupun in formal oleh *leading sektor*

3. Pada dimensi disposisi / sikap maka menyusun dan menerbitkan produk-produk kebijakan (*bulletin khusus*) secara kontinyu dan didistribusikan kepada pengelola arsip di seluruh SKPD.

4. Pada dimensi struktur organisasi maka secara kontinyu membuat pembinaan internal, khusus mensosialisasikan kewenangan tugas pokok dan fungsi arsiparis serta menerbitkan *job description* secara detail untuk panduan seluruh pengelola arsip.

Kedua, Karena adanya latar belakang permasalahan pada koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu terkait melakukan kegiatan, seluruh pengelola memiliki kesatuan tujuan maka disarankan kepada BAPUSIPDA agar menyusun rencana kegiatan yang bersipat kolektif dan terpadu yaitu melibatkan seluruh pengelola arsip yang ada di Kabupaten Garut.

Secara operasional langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

1. Pada dimensi unit atau organisasi, melibatkan berbagai pihak yang terkait seperti badan usaha pemerintah, pihak swasta dan para pakar untuk menyusun strategi yang paling relevan dengan kondisi internal organisasi perangkat daerah
 2. Pada dimensi sumber atau potensi, mendorong pengelola arsip meningkatkan kompetensi individualnya dengan memberi kelonggaran dan *support finacial* untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang berkorelasi dengan pekerjaannya.
 3. Pada dimensi kesatuan, melakukan berbagai pembenahan infrastruktur sehingga lebih refresentatif dan mengalokasikan waktu serta biaya untuk kegiatan-kegiatan yang akan mendorong kekompakan pegawai (*gathering, study tour, outbond* dsb).
 4. Pada dimensi gerak kegiatan, melakukan kontrol secara ketat dan berkala terhadap hasil kerja pengelola arsip dan menerapkan *funishment* dan *reward* sebagai bagian dari tindakan evaluatif.
 5. Pada dimensi keserasian, maka pihak BAPUSIDA dan SKPD melakukan uji coba penerapan metode yang relevan dngan standar ANRI seperti penerapan kartu kendali.
 6. Pada dimensi arah yang sama, maka pihak BAPUSIDA dan SKPD melakukan pendekatan secara struktural seperti melakukan audiensi , kunjungan kerja ke setiap SKPD bagian arsip.
- Ketiga,** Karena adanya latar belakang permasalahan pada kualitas pelayanan kearsipan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Kabupaten Garut yaitu mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengelola arsip di SKPD, maka disarankan agar adanya rumusan pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai pendekatan yang paling memungkinkan dilakukan sesuai dengan kapasitas lembaga. Secara operasional langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah:
1. Pada dimensi *responsiveness*, menyediakan ruang pengaduan pelanggan dan menindaklanjutinya dengan perbaikan-perbaikan secara segera
 2. Pada dimensi *reliability*, melalui bidang terkait melakukan pendekatan secara personal (*motivation* dan *sharring*) dan pendekatan secara struktural (apresiasi/penghargaan) dengan pengelola arsip.
 3. Pada dimensi *assurance*, membuat standar operasional prosedur pelayanan yang dipublikasikan baik dilingkungan sendiri ataupun kepada pihak luar.
 4. Pada dimensi *empathy*, pihak BAPUSIDA dan SKPD melakukan *quality kontrol* terhadap kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa

5. Pada dimensi *tangible*, maka BAPUSIDA dan SKPD segera memperbaiki sarana dan prasarana sehingga lebih *representatif* karena akan mendukung terhadap kenyamanan serta pembangunan citra lembaga pelayan publik.

Adapun saran untuk penelitian lebih lanjut, mengingat terdapat beberapa temuan penting pada penelitian serta keterbatasan dalam penelitian ini maka diharapkan pada masa yang akan datang berbagai pihak dapat meneliti lebih lanjut faktor lain dari variabel-variabel penelitian ini. Penelitian lanjutan lain yang disarankan diantaranya mengenai budaya organisasi, analisis jabatan, kompetensi profesionali, manajemen sumber daya manusia dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abubakar,Hadi, 1996, *Pola kearsipan modern (system kartu kendali)* edisi revisi, Djambatan Jakarta.

Amsay, Zulkifli, 2012, *Manajemen Kearsipan*, cet ke-9 , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Barthos, Basir. 2012.*Manajemen Kearsipan*, Bumi Aksara.Jakarta.

Dewi, Irra Chrisyanti, 2011, *Manajemen Kearsipan*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Hasibuan, Malayu, S.P, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Iskandar, Jusman 2015/a, *Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, cet ke-10, Puspaga Bandung.

_____.2015/b. *Indeks dan Skala dalam Penelitian*,cet ke-2, Puspaga Bandung.

_____.2015/c. *Manajemen Publik*. Cet ke-16, Puspaga. Bandung.

_____. 2014/d. *Teori Sosial*. Cet ke-10, Puspaga. Bandung.

_____. 2015/e, *Metode Penelitian*. Cet ke -16 Puspaga. Bandung.

_____. 2014/f, *Pembangunan Sosial*. Cet ke-3 Puspaga. Bandung.

Iskandar, Jusman dan Putradi, Didit, 2015, *Teori Administrasi*, Puspaga, Bandung.

Mangkunegara,Anwar Prabu, 2003. *Perencanaan dan Pengembangan SDM*, cet.ke-1 Refika Aditama, Bandung.

Mukarom, Zaenal dan Muhibun Wijaya Laksana, 2015, *Manajemen Pelayanan Publik*, Pustaka Setia, Bandung.

- Mulyana, Dedy. 2011, *Komunikasi* (suatu pengantar). Cet ke-15 Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Napitulu, Paimin, 2014. *Pelayanan Publik & Costumer Satisfaction*, cet ke-3, Alumni, Bandung.
- Ratminto & Winarsih, Atik Septi, 2010. *Manajemen Pelayanan* (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen Charter dan Standar Pelayanan Minimal), cet VII , Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin, 2011, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Siagian, Sondang. 2012, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Cet ke-4 Rineka Cipta. Jakarta.
- Sinambela. Lijan Poltak, 2012, *Kinerja Pegawai (teori pengukuran kinerja)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Subkhi, Ahmad dan Muhammad Jauhar, 2013, *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi* Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*.,Cet ke-16 Alfabeta. Bandung.
- Thoha.Miftah. 2012. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Edisi 22. PT. Rajagrafindo Persada.
- Tjiptono Fandu dan Anastasia Diana, 2003, *Total Quality Manajemen*, edisi revisi, Yogyakarta, Andi.
- Wibisono, Darmawan, 2011, *Manajemen Kinerja Koorporasi dan Organiasi (panduan menyusun indicator)*, Erlangga , Jakarta.
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik (teori,Proses dan Study Kasus)*, cet.1 Yogyakarta,CAPS.
- Dokumen-dokumen**
- Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- Undang–Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- Pemerintah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembinaan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Instruksi Menteri dalam negeri Nomor
4 Tahun 1993 tentang
Peningkatan, Penyelenggaraan,

Pengembangan dan Pembinaan
Perustakaan di Lingkungan
Pemerintah Daerah.